

PERAN GENDER DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN: ANALISIS LINTAS PROVINSI DI INDONESIA

GENDER'S ROLE IN POVERTY ALLEVIATION: A CROSS-PROVINCIAL ANALYSIS IN INDONESIA

Shifa Nur Amalia

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi
Jl. TMP Kalibata, DKI Jakarta, Indonesia
E-mail: shifanuramalia123@gmail.com

Lestari Agusalim

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi
Jl. TMP Kalibata, DKI Jakarta, Indonesia
E-mail: lestariagusalim@trilogi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran gender dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan analisis lintas provinsi. Riset ini penting untuk dilakukan karena sejalan dengan tujuan pertama dan kelima dan ke dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni penghapusan kemiskinan dan mewujudkan kesetaraan gender. Metode analisis regresi data panel diterapkan dengan menggunakan data tahun 2010-2022 di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menyoroti bahwa variabel pembangunan gender dan pertumbuhan ekonomi memainkan peran krusial dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, variabel pemberdayaan gender, rasio upah gender, pertumbuhan investasi, dan tingkat pengangguran tidak memiliki dampak yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan perlunya meningkatkan pemberdayaan perempuan, terutama melalui peningkatan akses pendidikan, untuk mencapai kesetaraan gender sebagai kunci utama dalam mengatasi kemiskinan di berbagai provinsi Indonesia. Temuan ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencapai pembangunan inklusif di seluruh negeri.

Kata Kunci: pembangunan gender, pemberdayaan gender, kemiskinan

Abstract

This research analyzes the role of gender in the context of poverty alleviation in Indonesia through cross-province analysis. The study is crucial as it aligns with the first and fifth goals of the Sustainable Development Goals (SDGs), namely, poverty eradication and achieving gender equality. The method of panel data regression analysis was applied using data from 2010 to 2022 across 34 provinces in Indonesia. The results highlight that gender development and economic growth variables play a crucial role in influencing poverty levels in Indonesia. Conversely, variables such as gender empowerment, gender wage ratio, investment growth, and unemployment rates do not have a significant impact. The study underscores the need to enhance women's empowerment, particularly through improved access to education, to achieve gender equality as a key element in addressing poverty across various provinces in Indonesia. These findings can guide policymakers in developing more effective strategies for achieving inclusive development nationwide.

Keywords: gender development, gender empowerment, poverty

PENDAHULUAN

Negara Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini dijelaskan secara tegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Realisasi dari tujuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, yang merupakan langkah krusial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya konkret dalam pengentasan kemiskinan (Pangiuk, 2018; Agusalim *et al.*, 2014).

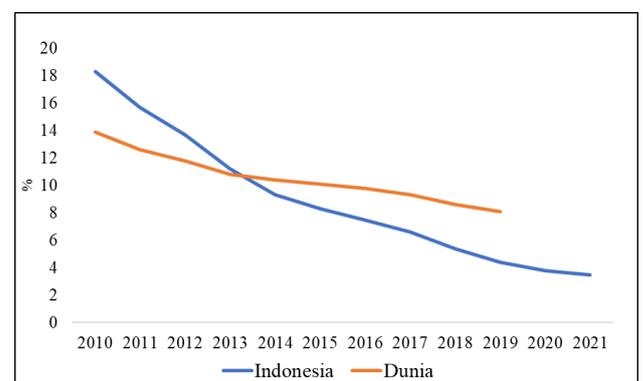
Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesetaraan gender menjadi isu yang sangat penting, terutama dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan, beberapa di antaranya langsung berkaitan dengan kemiskinan. SDGs mewarisi semangat *Millennium Development Goals* (MDGs) yang memandang pemberantasan kemiskinan sebagai isu global utama yang perlu ditangani secara menyeluruh, dan Indonesia bukanlah pengecualian dalam menghadapi tantangan serius ini (Ishatono & Raharjo, 2016).

Pemerintah Indonesia merespons permasalahan kemiskinan ini dengan merancang kebijakan dan mengambil komitmen terkait SDGs melalui rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Langkah konkret juga diambil melalui penerapan Perpres Nomor 59 Tahun 2017, yang mengatur pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia (Arianto, 2019). Dengan dua inisiatif tersebut dan penetapan tujuan SDGs, terutama terkait kemiskinan dan kesetaraan gender, implementasinya dapat dilakukan di semua tingkatan pemerintahan.

Kesetaraan gender diwujudkan ketika laki-laki dan perempuan memiliki tujuan, kondisi, dan kapasitas yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan, seperti yang diungkapkan oleh Munasaroh (2022).

Pada bulan September 2022, World Bank melakukan pembaruan terhadap garis kemiskinan global dengan menetapkan ukuran paritas daya beli (PPP) baru pada tahun 2017,

sebagaimana diinformasikan oleh Triono & Sangaji (2023). Gambar 1 tahun 2017 menunjukkan bahwa sebelumnya garis kemiskinan dunia adalah \$1,90 per hari. Namun, dengan pembaruan tersebut, garis kemiskinan naik menjadi \$2,15 per hari pada tahun 2019. Pada tahun tersebut, sekitar 8,4 persen dari jumlah penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan global dengan pendapatan sebesar \$2,15 per hari. Gambar 1 juga mencerminkan situasi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010, dengan angka sebesar \$18,3, dan menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, angka kemiskinan Indonesia mencapai \$3,5.



Gambar 1. Tingkat kemiskinan Indonesia dan Dunia dengan Pendapatan Kurang dari \$2,15 per Hari (2017 PPP) (% dari populasi)

Sumber: Worldbank - 2010-2021 (diolah)

Dalam penelitiannya, Dormekpor (2015) mengkaji hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan gender di negara sedang berkembang. Masalah kemiskinan dan ketimpangan gender ternyata dialami dengan cara yang berbeda di banyak negara sedang berkembang dibandingkan dengan negara maju, dan berbagai definisi diberikan dari berbagai perspektif. Meskipun para pemerintah di negara-negara ini telah merancang kebijakan untuk mengurangi dan memberantas masalah tersebut, kemiskinan dan ketimpangan gender terus menjadi permasalahan besar.

Beberapa faktor yang menjelaskan posisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan di negara sedang berkembang termasuk, pertama, akses yang sangat terbatas bagi perempuan terhadap aset domestik seperti hak atas tanah dan bangunan. Kedua, perempuan dalam negara sedang berkembang mengalami keterbatasan dalam akses pasar kredit, terkait dengan

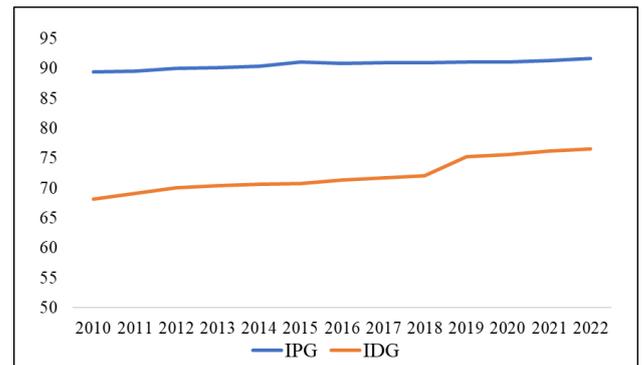
diskriminasi gender di mana laki-laki atau suami lebih mudah mendapatkan kredit dibandingkan perempuan. Ketiga, pasar asuransi di negara sedang berkembang tidak berfungsi dengan optimal. Keempat, perempuan umumnya memiliki akses yang rendah di pasar kerja dan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Klasen *et al.*, 2015).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi status kemampuan dasar penduduk, yang mencakup angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. IPG digunakan untuk mengukur akses terhadap sumber daya yang mendukung standar hidup yang layak (Kertati, 2021). Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan dan peran perempuan dalam bidang politik dan ekonomi. IDG mencerminkan partisipasi perempuan dalam kegiatan sehari-hari, terutama di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik, serta memberikan gambaran kondisi ekonomi saat ini (Lestari *et al.*, 2020).

Kemiskinan memiliki dampak signifikan terhadap akses perempuan terhadap kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja. Hal ini juga mengurangi kemampuan perempuan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, bersama dengan perbaikan akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, berkontribusi pada peningkatan kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam dunia kerja menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan sosio-ekonomi dan upaya menurunkan tingkat kemiskinan (Awan & Sadia, 2018).

Data pada Gambar 2 menggambarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Pada tahun 2010, IPG mencapai 89,42, lalu mengalami peningkatan menjadi 91,03 pada tahun 2015. Tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi 90,82, tetapi kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan kembali menjadi 90,96. Tren positif terus berlanjut, dengan IPG mencapai

91,63 pada tahun 2022. Selain itu, data juga mencantumkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Pada tahun 2010, IDG berada pada angka 68,15 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, IDG mencapai 76,59. Peningkatan IDG menunjukkan perkembangan dalam keterlibatan dan peran perempuan di berbagai bidang, seperti politik dan ekonomi, selama periode tersebut.



Gambar 2. Perkembangan IPG & IDG di Indonesia Tahun 2010-2022

Sumber: BPS Indonesia 2010-2021 (diolah)

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi hubungan antara tingkat kemiskinan dan peran gender di Indonesia mencatatkan temuan-temuan yang beragam. Meskipun sebagian besar penelitian lebih fokus pada kasus program pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi tertentu, namun hasil-hasil tersebut masih bersifat parsial tanpa melibatkan perspektif agregat kemiskinan dan pemberdayaan gender di latar belakang wilayah.

Sebagai contoh, Auzar (2021) menemukan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Peneliti menyimpulkan bahwa semakin berdaya perempuan, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan, tingkat kemiskinan turut menurun, meskipun pengaruh IPM laki-laki lebih besar, walaupun perbedaannya tipis.

Penelitian lain oleh Putri & Fakhruddin (2016) menyoroti penurunan ketidaksetaraan dengan meningkatnya peran perempuan di Aceh. Mereka menyimpulkan bahwa kesejahteraan meningkat seiring dengan peningkatan peran

perempuan dalam pasar kerja, yang juga berkontribusi pada penurunan relatif tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai peran gender terhadap kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran gender terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai rujukan kepada pemerintah untuk memastikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam ekonomi, agar negara dapat mengurangi kemiskinan.

KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, ukuran kemiskinan didasarkan pada konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang dikenal sebagai pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam konsep ini, kemiskinan diartikan sebagai kemampuan sektor ekonomi untuk menyediakan kebutuhan makanan pokok, bukan hanya makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (GK).

GK menentukan jumlah nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan. GK terdiri dari dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). GKM diukur dengan pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang setara dengan asupan kalori sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan makanan dasar mencakup 52 jenis komoditi, seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak. Sementara itu, GKNM diukur dengan pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan

Nurkse (1961) dalam teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

mengungkapkan bahwa kemiskinan muncul karena adanya hambatan dalam pembentukan modal, baik dari segi penawaran maupun permintaan. Dari segi permintaan, tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kesulitan dalam mengumpulkan modal. Di sisi lain, dari segi penawaran, penurunan standar hidup masyarakat secara umum menjadi pemicu menurunnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menghambat kemampuan investor untuk berinvestasi dan menyebabkan kenaikan harga beberapa barang dan jasa. Teori Myrdal (1957, 1968) menekankan bahwa lingkaran kemiskinan timbul akibat kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar. Awalnya, kemiskinan dipicu oleh pendapatan rendah, membuat rumah tangga tidak mampu memberikan nutrisi yang memadai. Kondisi gizi yang kurang baik menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesehatan, menghambat peningkatan produktivitas. Tingkat produktivitas yang rendah mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efisien, menyebabkan penurunan pendapatan penduduk, dan akhirnya mendorong terjadinya kemiskinan.

Menurut Martin Ravallion (1998), garis kemiskinan relatif sering kali lebih rendah di negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini mengindikasikan bahwa standar atau ambang batas yang digunakan untuk menentukan kemiskinan dapat berbeda antara negara-negara tersebut. Faktor ini mencerminkan perbedaan dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya antara negara berkembang dan maju.

Selain itu, Ravallion juga menyoroti pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap konsep kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat memengaruhi persepsi dan definisi kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan, hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan relatif dan membuat garis kemiskinan relatif lebih rendah. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi stagnan atau negatif, tingkat kemiskinan relatif dapat meningkat.

Penting untuk memahami perbedaan antara tingkat kemiskinan relatif dan absolut. Tingkat kemiskinan absolut didasarkan pada kriteria konkret yang menilai kemampuan

individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pendekatan ini lebih bersifat konkret dan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang tingkat kemiskinan seseorang atau kelompok. Dalam hal ini, Ravallion menyoroti pentingnya mempertimbangkan kedua aspek ini untuk memahami dan mengukur kemiskinan dengan lebih baik.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan pemerintah, dan salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy/NEP*). NEP dirancang untuk membantu masyarakat yang masih tergolong miskin dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perumahan, dan pekerjaan di sektor publik. Pemerintah juga aktif memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan mengimplementasikan program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta mendorong pembangunan ekonomi. Dalam melakukan pengukuran kemiskinan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbedaan harga barang dan jasa di berbagai wilayah atau kelompok sosial, sesuai dengan pandangan yang diungkapkan oleh Ravallion (2020).

Pembangunan Gender

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemempda) tahun 2023, gender adalah suatu hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Ini melibatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, serta bagaimana hubungan sosial ini dibangun. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi menyoroti ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Metodologi penghitungan IPG, yang mengacu pada UNDP tahun 2010, didasarkan pada tiga dimensi utama pembangunan gender. Pertama, dimensi umur panjang dan kesehatan mencakup indikator-indikator seperti angka harapan hidup pada kelahiran untuk laki-laki dan perempuan, indikator kematian ibu dan kematian anak, serta indikator umur panjang dan kesehatan secara umum. Kedua, dimensi pendidikan melibatkan indikator seperti harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan (HLS) serta rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan (RLS). Ketiga, dimensi pemberdayaan ekonomi mencakup indikator partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Dengan mengintegrasikan dimensi-dimensi ini, IPG memberikan gambaran yang komprehensif tentang ketidakadilan gender dalam pencapaian pembangunan, menggambarkan bagaimana laki-laki dan perempuan mengakses dan mengambil manfaat dari sumber daya dan peluang di berbagai aspek kehidupan.

Pemberdayaan Gender

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Metodologi penghitungan IDG masih didasarkan pada metode lama hingga tercapainya Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG). IDG berfokus pada tiga dimensi utama pembangunan gender, yakni dimensi keterwakilan di parlemen, dimensi pengambilan keputusan, dan dimensi distribusi pendapatan.

Dimensi keterwakilan di parlemen mencakup indikator-indikator seperti proporsi keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan melibatkan indikator-indikator seperti proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi laki-laki dan perempuan. Dimensi distribusi pendapatan mencakup indikator-indikator seperti upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan.

IDG mengarah pada partisipasi dengan mengukur ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan

keputusan. Untuk menghitung IDG, metode yang digunakan adalah *Gender Empowerment Measure* (GEM) hingga tercapainya perhitungan Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG). Dengan fokus pada partisipasi dan ketidaksetaraan gender, IDG memberikan gambaran yang lebih holistik tentang sejauh mana perempuan dapat terlibat dan memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan.

Hubungan Gender Terhadap Kemiskinan

Pembangunan manusia memiliki potensi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pentingnya pembangunan manusia melibatkan setiap individu dengan cara yang bermakna tanpa adanya diskriminasi yang dapat mengurangi kapasitas mereka dalam mengatasi kemiskinan. Aspek gender dalam kapasitas manusia secara umum menjadi pertimbangan krusial dalam konteks ini. Ketidaksetaraan gender, terutama yang cenderung mempengaruhi perempuan dan meningkatkan risiko kemiskinan bagi mereka, menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menanggulangi kemiskinan itu sendiri.

Penting untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan harus diberikan hak dan akses yang sama terhadap sumber daya, sehingga mendorong pertumbuhan yang inklusif. Memastikan kesetaraan gender tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih adil, tetapi juga dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan yang sering kali terjadi dalam rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan inklusivitas, keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan menciptakan masyarakat di mana perempuan memiliki peran yang setara dan akses yang sama terhadap peluang, pemerintah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi masalah kemiskinan secara lebih efektif (UNDP, 2016).

Beberapa penelitian telah menggali hubungan antara gender dan kemiskinan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chateni *et al.*, (2019) di Afrika Selatan, yang menyoroti dampak signifikan gender terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Temuan

menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki. Faktor-faktor seperti kepemilikan aset, akses ke layanan publik, dan tingkat pendidikan berperan dalam menentukan apakah suatu wilayah cenderung miskin atau tidak. Hasil penelitian ini juga menegaskan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan di Afrika Tenggara.

Sebaliknya, penelitian oleh Aprilia dan Triani (2022) di Indonesia menghasilkan temuan yang berbeda. Mereka menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tidak secara signifikan dipengaruhi oleh gender. Meskipun tingkat ketidaksetaraan gender meningkat, dampak langsungnya terhadap kemiskinan tidak begitu mencolok. Namun, penelitian ini mengakui adanya hambatan dalam keterlibatan perempuan dalam pembangunan, yang dapat mengurangi kontribusi mereka terhadap produksi dan efektivitas ekonomi. Dengan pertimbangan tingkat ketidaksetaraan gender yang berbeda di setiap daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan, dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia, gender mungkin tidak memiliki pengaruh yang sama kuat terhadap tingkat kemiskinan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri atas data tingkat kemiskinan, IPG, IDG, rasio upah laki-laki terhadap perempuan, pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal tetap bruto, dan tingkat pengangguran terbuka yang bersumber dari BPS. Riset ini dilakukan selama periode tahun 2010 hingga 2022 di 34 provinsi di Indonesia.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini, akan menganalisis peran gender di setiap Provinsi di Indonesia. IPG dan IDG digunakan untuk mengukur peran gender di Indonesia. Metode analisis data panel merupakan metode yang digunakan untuk analisis empiris dengan data yang lebih dinamis. Data panel adalah hasil observasi terhadap

kumpulan dari data *cross-section* dan *time-series*. Menurut Widarjono (2017), data panel memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu, data panel menggabungkan informasi dari data *time-series* dan *cross-section* untuk mengatasi masalah yang muncul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Berikut spesifikasi model empiris pada penelitian ini yang ini dimodifikasi dari Putri dan Fakhruddin (2016) dan Auzar (2021):

➤ **Model 1**

$$tk = a + a_1ipg_{it} + a_2rulp_{it} + a_3lpdrbk_{it} + a_4lpmtb_{it} + a_5tpt_{it} + \varepsilon_{it}$$

➤ **Model 2**

$$tk = \beta + \beta_1idg_{it} + \beta_2rulp_{it} + \beta_3lpdrbk_{it} + \beta_4lpmtb_{it} + \beta_5tpt_{it} + \varepsilon_{it}$$

➤ **Model 3**

$$tk = \theta + \theta_1ipg_{it} + \theta_2idg_{it} + \theta_3rulp_{it} + \theta_4lpdrbk_{it} + \theta_5lpmtb_{it} + \theta_6tpt_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimna *tk* adalah tingkat kemiskinan, *ipg* adalah indeks Pembangunan gender, *idg* adalah indeks pemberdayaan gender, *rulp* adalah rasio upah laki-laki terhadap Perempuan, *lpdrbk* adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita yang di ubah ke dalam bentuk logaritma natural), *lpmtb* adalah pertumbuhan investasi (penetapan modal tetap bruto per kapita yang di ubah ke dalam bentuk logaritma natural), dan *tpt* adalah tingkat pengangguran terbuka. *a*, *β*, dan *θ* adalah parameter estimasi. *ε* adalah *error term*, *i* adalah data *cross-section* 34 provinsi, dan *t* adalah data *time-series* tahun 2010-2022.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Peran gender mencerminkan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat, di mana kegiatan, tugas, atau sikap yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dapat dibedakan (KemenPPPA, 2023). Untuk mengukur peran gender dalam masyarakat, digunakan indeks

seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indeks ini berperan penting dalam mengidentifikasi kesenjangan gender dan mengukur tingkat pemberdayaan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Rentang nilai dari 1 hingga 100 pada IPG dan IDG mencerminkan tingkat ketidaksetaraan gender. Semakin mendekati nilai 100, semakin terlihat penurunan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, menciptakan gambaran yang lebih seimbang dalam peran mereka dalam masyarakat.

IPG berfungsi sebagai gambaran kesetaraan gender dalam pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, masing-masing dengan indikator-indikator spesifik yang mencerminkan kondisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Dengan mengukur kesenjangan antara keduanya di setiap dimensi, IPG memberikan nilai yang mencerminkan tingkat kesenjangan gender dalam pembangunan manusia.

Di sisi lain, IDG digunakan untuk menilai keterlibatan peran aktif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender ini berperan sebagai alat untuk mengevaluasi capaian hasil pembangunan berbasis gender, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Tanziha *et al.*, 2021).

Pada tahun 2010, Provinsi Jakarta mencapai nilai tertinggi dalam pembangunan gender sebesar 93,76, sementara Provinsi Papua memiliki nilai terendah, yaitu 73,93. Rata-rata nilai pembangunan gender pada tahun tersebut adalah 87,99. Pada tahun 2022, Provinsi Yogyakarta mencapai nilai tertinggi sebesar 94,99, sedangkan Provinsi Papua masih memiliki nilai terendah, yaitu 81,04. Meskipun nilai pembangunan gender Provinsi Papua meningkat setiap tahunnya, tetapi tetap menjadi yang terendah di antara provinsi lain (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010-2022 di Indonesia

Prov	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	2010	2022	%ΔIPG	2010	2022	%ΔIDG
	AC	89,05	92,24	0,04	53,40	63,92
SU	89,43	91,06	0,02	67,78	69,33	0,02
SB	91,98	94,72	0,03	63,04	65,48	0,04
RI	85,17	88,71	0,04	65,14	71,16	0,09
JA	83,04	88,95	0,07	57,91	67,86	0,17
SS	89,73	92,95	0,04	67,32	74,89	0,11
BE	88,88	91,36	0,03	68,50	70,13	0,02
LA	87,18	90,58	0,04	65,32	68,24	0,04
BB	86,87	89,55	0,03	55,62	58,20	0,05
KR	92,05	93,50	0,02	56,70	59,05	0,04
JK	93,76	94,93	0,01	73,23	75,30	0,03
JB	86,94	89,80	0,03	67,01	71,22	0,06
JT	90,32	92,83	0,03	67,96	73,78	0,09
YO	92,82	94,99	0,02	77,70	76,87	-0,01
Jl	88,80	92,08	0,04	67,91	74,42	0,10
BT	90,22	92,18	0,02	65,66	68,55	0,04
BA	90,90	94,36	0,04	58,53	72,29	0,24
NB	86,53	91,08	0,05	54,49	53,47	-0,02
NT	90,06	92,96	0,03	57,98	75,22	0,30
KB	84,09	87,61	0,04	55,26	73,18	0,32
KT	88,02	89,20	0,01	68,62	81,98	0,19
KS	88,00	89,44	0,02	62,53	74,80	0,20
KI	83,00	86,61	0,04	60,05	66,89	0,11
KA		87,85			61,92	
SA	93,10	94,89	0,02	71,20	78,99	0,11
ST	91,23	92,24	0,01	65,37	77,52	0,19
SN	91,54	93,14	0,02	62,46	76,37	0,22
SG	87,90	91,04	0,04	64,26	73,72	0,15
GO	83,26	88,12	0,06	61,35	71,20	0,16
SR	87,53	89,79	0,03	63,15	66,55	0,05
MA	91,79	93,20	0,02	75,94	74,99	-0,01
MU	85,29	90,30	0,06	58,17	78,99	0,36
PB	81,15	83,61	0,03	57,97	61,93	0,07
PA	73,93	81,04	0,10	55,42	68,66	0,24
Minimum	73,93	81,04	0,01	53,40	53,47	-0,02
Maksimum	93,76	94,99	0,10	77,70	81,98	0,36
Rasio	1,27	1,17	8,69	1,46	1,53	-19,12
Rata-rata	87,99	90,79	0,03	63,42	70,50	0,12

Catatan: IPG & IDG pada tahun 2010-2013 tidak tersedianya data pada Provinsi Kalimantan Utara pada waktu itu.

Sumber: BPS Indonesia, 2010-2022 (diolah)

Pembangunan gender Provinsi Papua selalu tertinggal karena perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Indikator pendidikan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, mencerminkan perbedaan kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah. Faktor ekonomi juga berperan, di mana dalam kondisi rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi, orang tua cenderung memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

Pada tahun 2022, nilai rata-rata pembangunan gender mencapai 90,76. Rasio perbandingan nilai pemberdayaan gender pada tahun 2010 berkisar antara 1,27 kali lipat (tertinggi) hingga 1,17 kali lipat pada tahun 2022 (terendah), dengan nilai rata-rata. Rasio ini mencerminkan variasi dalam pemberdayaan gender di antara provinsi-provinsi tersebut.

Nilai pemberdayaan gender tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tabel 1 memperlihatkan pada tahun 2010 nilai pemberdayaan gender di Provinsi Yogyakarta sebesar 77,70. Sedangkan pemberdayaan gender terendah berada di Provinsi Aceh yaitu 53,40. Pada tahun 2022 nilai pemberdayaan gender tertinggi berada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 81,98. Sedangkan pemberdayaan gender terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 53,47. Rasio perbandingan nilai pemberdayaan gender pada tahun 2010 tertinggi dan terendah yaitu sebesar 1,46 kali lipat dengan rata-rata. Rasio perbandingan nilai pemberdayaan gender pada tahun 2022 tertinggi dan terendah yaitu sebesar 1,53 kali lipat dengan rata-rata. Rata-rata pemberdayaan gender pada tahun 2010 adalah 63,42 dan pada tahun 2022 yaitu 70,50.

Tabel 2 memperlihatkan pada tahun 2010 nilai tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebesar 36,80 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Provinsi Jakarta yaitu 3,48 persen. Pada tahun 2022 nilai tingkat kemiskinan tertinggi berada Provinsi Papua sebesar 26,80 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Provinsi Bali yaitu 4,3 persen. Rasio perbandingan nilai tingkat kemiskinan pada tahun 2010 tertinggi dan terendah yaitu sebesar 10,57 kali lipat dengan rata-rata. Rasio perbandingan nilai tingkat kemiskinan pada tahun 2022 tertinggi dan terendah yaitu sebesar 5,92 kali lipat dengan rata-rata. Rata-rata tingkat kemiskinan pada tahun 2010 adalah 14,43 persen dan pada tahun 2022 yaitu 10,30 persen.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2022 di Indonesia

Prov	2010	2022	Δ TK
AC	20,98	14,75	-6,23
SU	11,31	8,33	-2,98
SB	9,50	6,04	-3,46
RI	8,65	6,84	-1,81
JA	8,34	7,70	-0,64
SS	15,47	11,95	-3,52
BE	18,30	14,34	-3,96
LA	18,94	11,44	-7,50
BB	6,51	4,61	-1,90
KR	8,05	6,03	-2,02
JK	3,48	4,61	1,13
JB	11,27	7,98	-3,29
JT	16,56	10,98	-5,58
YO	16,83	11,49	-5,34

Prov	2010	2022	Δ TK
JI	15,26	10,49	-4,77
BT	7,16	6,24	-0,92
BA	4,88	4,53	-0,35
NB	21,55	13,82	-7,73
NT	23,03	20,23	-2,80
KB	9,02	6,81	-2,21
KT	6,77	5,22	-1,55
KS	5,21	4,61	-0,60
KI	7,66	6,44	-1,22
KA	9,10	6,86	-2,24
SA	18,07	7,34	-10,73
ST	11,60	12,30	0,70
SN	17,05	8,66	-8,39
SG	23,19	11,27	-11,92
GO	13,58	15,51	1,93
SR	27,74	11,92	-15,82
MA	9,42	16,23	6,81
MU	34,88	6,37	-28,51
PB	36,80	21,43	-15,37
PA		26,80	
Minimum	3,48	4,53	-28,51
Maksimum	36,80	26,80	6,81
Rasio	10,57	5,92	-0,24
Rata-rata	14,43	10,30	-4,63

Catatan: TK pada tahun 2010-2012 tidak tersedianya data pada Provinsi Papua pada waktu itu.

Sumber: BPS Indonesia, 2010-2022 (diolah)

Analisis Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pengujian penting untuk menentukan teknik pemilihan model yang terbaik dalam penelitian. Pertama, uji Chow digunakan untuk memilih antara teknik pemilihan model *Common Effects Model* (CEM) atau *Fixed Effects Model* (FEM). Keputusan diambil berdasarkan probabilitas uji Chow; jika lebih kecil dari taraf nyata, model FEM dipilih, sedangkan jika lebih besar, model CEM yang digunakan. Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah memilih model FEM atau *Random Effects Model* (REM) lebih tepat. Jika probabilitas uji Hausman lebih kecil dari taraf nyata, maka model yang dipilih adalah FEM; sebaliknya, jika lebih besar, model yang dipilih adalah

REM. Terakhir, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara REM dan CEM. Jika hasil probabilitas LM lebih besar dari nilai *Chi-square*, maka model yang digunakan adalah REM. Sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari nilai *Chi-square*, maka model yang dipilih adalah CEM.

Dengan melakukan ketiga pengujian ini, penelitian dapat memastikan pemilihan model regresi data panel yang paling sesuai dengan karakteristik data yang dimiliki, sehingga hasil analisis lebih akurat dan relevan. Setelah melakukan beberapa pengujian untuk memilih metode analisis data panel yang paling baik untuk digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel, maka dipilih untuk model regresi data panel, maka dipilih untuk model pertama menggunakan FEM. Pada model kedua dan model ketiga menggunakan REM.

Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa hasil interpretasi untuk *R-squared* atau koefisien determinasi semua model mulai penelitian dari 0,12 persen sampai dengan 0,37 persen. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel independen penelitian pada masing-masing simultan dapat menjelaskan variabel dependen dari yang terkecil 0,12 persen sampai 0,37 persen. Karena dari ketiga model tersebut mendapatkan nilai *R-squared* di bawah 0,5, maka kemungkinan ada faktor lain dari error yang lebih besar yang dapat menjelaskan dan mempengaruhi di luar model regresi. Hasil *F-statistik* pada model pertama menunjukkan hasil kurang dari 0,5. Artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pada hasil *Wald Chi2* pada model kedua dan ketiga menunjukkan lebih dari 0,5. Artinya variabel independen pada model pertama dan model ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel independen	Variabel dependen: Tingkat kemiskinan		
	Model 1	Model 2	Model 3
<i>ipg</i>	-0.966*** (0.143)		-0.984*** (0.149)
<i>idg</i>		-0.0346 (0.0296)	0.0117 (0.0293)
Variabel kontrol			
<i>rulp</i>	-2.220 (1.957)	-1.971 (2.046)	-2.242 (1.960)
<i>lpdrbk</i>	-3.474***	-5.676***	-3.451***

Variabel independen	Variabel dependen: Tingkat kemiskinan		
	Model 1	Model 2	Model 3
	(0.951)	(0.977)	(0.960)
<i>lpmtb</i>	-0.00718 (0.378)	-0.648* (0.382)	-0.00252 (0.378)
<i>tpt</i>	0.130 (0.131)	0.186 (0.138)	0.134 (0.132)
Konstanta	112.5*** (12.05)	37.86*** (4.500)	113.2*** (12.21)
<i>R-square</i>	0.2145	0.1220	0.3732
<i>F-statistik</i>	20.25		
<i>Wald Chi²</i>		66.78	116.35
Observasi	433	433	433
Provinsi	34	34	34
Kriteria pemilihan model			
Uji Chow	0.0000	0.0000	0.0000
Uji Hausman	0.0000	0.0828	0.3082
Uji Lagrange multiplier	0.0000	0.0000	0.0000
Keputusan	FEM	REM	REM

Catatan: Dalam kurung adalah standard error, signifikan taraf nyata *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$
 Sumber: Hasil Kalkulasi Penulis Menggunakan Stata 17 (2023)

Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, tampak bahwa variabel pembangunan gender memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik pada model satu maupun model tiga. Dari hasil regresi pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi variabel pembangunan gender pada model pertama adalah -0,96, dan pada model ketiga adalah -0,98. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sekitar 0,96 hingga 0,98.

Peningkatan pembangunan gender di sini merujuk pada semakin setara capaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan ini tidak hanya melibatkan penduduk laki-laki, tetapi juga penduduk perempuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Temuan ini mendukung hipotesis awal bahwa pembangunan gender berkontribusi negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian juga sejalan dengan temuan Putri dan Fakhruddin (2016) di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa pembangunan gender memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap garis kemiskinan. Mereka menyatakan bahwa setiap kenaikan nilai

pembangunan gender dapat meningkatkan garis kemiskinan.

Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan gender tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dalam model dua maupun model tiga. Dilihat dari Tabel 3, nilai koefisien regresi untuk variabel pemberdayaan gender tidak menunjukkan signifikansi statistik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satu alasan mungkin adalah keterbatasan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kertati (2021) yang menyatakan bahwa meskipun tingkat pemberdayaan gender di Kota Surakarta mencapai rata-rata tingkat Jawa Barat, masih terdapat beberapa indikator pemberdayaan gender yang tertinggal, seperti partisipasi perempuan dalam politik dan kontribusi pendapatan perempuan dalam rumah tangga. Penurunan pada beberapa indikator tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan yang belum optimal dan dominasi unsur domestikasi yang masih kuat.

Pengaruh Rasio Perbandingan Upah Terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel rasio perbandingan upah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dalam model pertama hingga model ketiga. Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio perbandingan upah tidak menunjukkan pengaruh penurunan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Variabel rasio perbandingan upah mencerminkan rasio variasi upah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan minimum provinsi. Ketika rasio ini semakin besar, artinya ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan semakin besar. Kesenjangan upah berdasarkan gender menjadi salah satu masalah dalam perekonomian, terutama jika lebih banyak pekerja laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Hal ini dapat meningkatkan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, dipengaruhi oleh keseimbangan antara mengurus rumah tangga dan beraktivitas bekerja, faktor penting dalam menentukan upah. Analisis ketidaksetaraan gender dalam ekonomi menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi kepala rumah tangga sering kali harus memilih antara mengurus keluarga atau bekerja (KemenPPPA, 2016).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis regresi pada model pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi adalah -3,47, -5,67, dan -3,45, secara berturut-turut.

Nilai koefisien tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar -3,47 hingga -5,67. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingginya produktivitas penduduk di suatu wilayah, yang pada gilirannya

meningkatkan pendapatan masyarakat dan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Christiani dan Nainupu (2021) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengaruh Pertumbuhan Investasi Terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan investasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis regresi pada model pertama hingga model ketiga menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan investasi tidak signifikan.

Pertumbuhan investasi dianggap sebagai faktor yang dapat meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja, yang pada teorinya dapat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan antara pertumbuhan investasi dan tingkat kemiskinan.

Dalam konteks ini, penelitian Kusumaningrum dan Yuhan (2019) memberikan perspektif bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur dapat mempermudah distribusi barang ke daerah-daerah terpencil dan mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual dan dinamika ekonomi yang kompleks.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran (TPT) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis regresi pada model pertama hingga model ketiga menunjukkan bahwa nilai

koefisien regresi untuk variabel tingkat pengangguran tidak signifikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penjelasan yang diberikan adalah bahwa meskipun ada anggota rumah tangga yang menganggur, adanya anggota keluarga lain yang bekerja dengan upah tinggi dapat membantu menanggung biaya hidup anggota yang menganggur. Dengan kata lain, keberadaan anggota keluarga yang memiliki pendapatan yang cukup dapat mencegah keluarga tersebut agar tidak hidup dalam garis kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Giovanni (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia. Variabel ini mungkin tidak menjadi faktor penentu tunggal dalam menjelaskan tingkat kemiskinan, dan faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan keluarga secara keseluruhan atau distribusi pendapatan juga perlu diperhitungkan.

Kebijakan Pembangunan Gender Dalam Pengurangan Kemiskinan

Menurut BPS (2023), gender merujuk pada perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan norma-norma yang melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kesetaraan gender di Indonesia diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang mencerminkan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dalam upaya mencapai kesetaraan gender, pemerintah Indonesia telah memperkuat peran aktif perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang dikeluarkan pada tahun 2000, menjadi landasan strategis untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pembangunan nasional. PUG bertujuan mengurangi kesenjangan gender dalam akses dan manfaat pembangunan serta

meningkatkan partisipasi dan kontrol perempuan terhadap proses pembangunan.

Tujuan Presiden pada periode 2020-2024 sejalan dengan visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), salah satunya adalah meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. KemenPPPA menerapkan kebijakan tersebut melalui Peraturan KemenPPPA No. 2 tahun 2020. Langkah-langkah KemenPPPA melibatkan peningkatan peran serta perempuan di sektor-sektor kunci pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.

Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan menjadi fokus penting KemenPPPA untuk memperkuat jejaring dan koordinasi. Data berbasis gender dianggap sebagai alat penting dalam merumuskan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia bertujuan mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

PENUTUP

Data pembangunan gender di Indonesia menunjukkan variasi signifikan antar provinsi. Provinsi Jakarta mencatat nilai tertinggi pada tahun 2010 dengan 93,76, sementara Provinsi Papua memiliki nilai terendah, yaitu 73,93. Meskipun pembangunan gender di Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun nilai tetap terendah dibandingkan provinsi lain hingga tahun 2022. Sebaliknya, Provinsi Yogyakarta mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan 94,99.

Pada tahun 2010, pemberdayaan gender tertinggi terjadi di Provinsi Yogyakarta dengan nilai 77,70, sedangkan Provinsi Aceh memiliki pemberdayaan gender terendah, yaitu 53,40. Pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Tengah mencapai nilai tertinggi pemberdayaan gender (81,98), sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai terendah (53,47). Berdasarkan analisis, variabel pembangunan

gender dan pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, variabel pemberdayaan gender, rasio upah laki-laki terhadap perempuan, pertumbuhan investasi, dan tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kesetaraan gender dapat diperkuat melalui upaya pemberdayaan perempuan, termasuk peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan. Peningkatan pendidikan perempuan dapat berperan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan secara positif memengaruhi kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda, S. A., & Cahyono, H. (2022). Apakah IPM, pengangguran, dan pendapatan perempuan berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan di Kota Surabaya? *Independent: Journal of Economics*, 2(1), 61-76. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.43769>.
- Adnan, G., & Amri, K. (2020). Pemberdayaan gender, pendapatan perempuan dan penurunan kemiskinan: Bukti data panel dari Kawasan Barat Indonesia. *Media Ekonomi*, 28(1), 37-56. <https://doi.org/10.25105/me.v28i1.6265>.
- Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2014). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(01).
- Aini, A. N. (2021). Analisis indeks pembangunan gender kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 77-91. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.147>.
- Aprilia & Triani. (2022). Analisis pengaruh ketimpangan gender, rasio ketergantungan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(3), 43-50.
- Arianto, Z. (2019). Upaya pemerintahan Joko Widodo dalam mendorong implementasi *sustainable development goals* di Indonesia.
- Auzar, Z. (2021). Feminization of poverty, multiple pandemic, and feminization of pandemic. In prosiding *Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. 1(1). 248-286.
- Awan, A. G., & Sadia, R. F. (2018). Female participation in labor force and its impact on household and national income: Evidence from Pakistan. *Global Journal of Management, Social Sciences and Humanities*, 4(4), 773-784.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). Konsep gender, IPG dan IDG. Diunduh pada link <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab1>. Diakses pada 17 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). Metodologi IPG dan IDG. Diunduh pada link <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab2>. Diakses pada 17 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). Penduduk miskin dan garis kemiskinan. Diunduh pada link <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Diakses pada 17 Mei 2023.
- Basuki, A. T. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers
- Cheteni, P., Khamfula, Y., & Mah, G. (2019). Gender and poverty in South African rural areas. *Cogent Social Sciences*. 1(5), 1-19. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1586080>
- Christiani, N. V., & Nainupu, A. E. (2021). Pengaruh akses terhadap internet, listrik dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019. *Jurnal Statistika Terapan*, 1(1), 37-52. <https://doi.org/10.5300/jstar.v1i1.14>
- Damanhuri, D. S. (2010). *Ekonomi politik dan pembangunan: Teori, kritik dan solusi bagi Indonesia dan negara sedang berkembang*. Kota Bogor. PT Penerbit IPB Press.
- Della Putri, C., & Fakhruddin, F. (2016). Ketidaksetaraan gender pada kemiskinan wilayah Aceh: Studi komparasi wilayah

- Kota di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 400-408.
- Direja, S., & Paramitasari, N. (2022). Pengaruh ketidaksetaan gender pada Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(1), 58-70.
- Dormekpor, E. (2015). Poverty and gender inequality in developing countries. *Developing Country Studies*, 5(10), 76-102.
- Giovanni, R. (2018). Analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23-31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Itang, I. (2015). Faktor- faktor penyebab kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1-30.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2016). *Statistik gender tematik Potret Ketimpangan gender dalam ekonomi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (kemenPPPA). (2023). Peran gender dan gender. Diunduh pada link <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/20#:~:text=Pengarusutamaan%20Gender%20adalah%20proses%20untuk,proyek%2C%20program%20dan%20kebijakan%20pemerintah>. Diakses pada 28 Juli 2023.
- Kertati, I. (2021). Analisis indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, Vol 2(1), 1-11. <http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1960>
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharrudin, Alfiasari, Syarief, H., & Sukandar, D. (2015). Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin. Jakarta: *Kerjasama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Klasen, S., Lechtenfeld, T., & Povel, F. (2015). A feminization of vulnerability? Female headship, poverty, and vulnerability in Thailand and Vietnam. *World Development*, 71, 36-53.
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia berdasarkan indeks komposit pertumbuhan inklusif dan faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(1), 1-17. <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150>
- Kusumastuti, A. E. (2019). Peran perempuan dalam mengurangi kemiskinan. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 39-46. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.5>.
- Lestari, S., Marwah, S., & Pratiwi, O. C. (2020). Capaian indeks pemberdayaan gender Kabupaten Banyumas pasca MDGS dalam perspektif regional dan nasional. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Universitas Jenderal Soedirman*. 9(1).
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda). *Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333-342. <https://doi.org/10.30598/barekengvo114iss3pp333-342>
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana*, 13(2), 117-134. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.175>
- Munasaroh, A. (2022). Problematik kekerasan berbasis gender dan pencapaian gender equality dalam sustainable development goals di Indonesia. *Ijousg: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1-20.
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and underdeveloped regions*. London: Gerald Duckworth and Co. Ltd.

- Myrdal, G. (1968). *Asian Drama: An inquiry into the poverty of nations. A twentieth century fund study*, 1, 2, 3. New York: Pantheon.
- Nazmi, L., & Jamal, A. (2018). Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 740–750.
- Nisak, S. S., & Sugiharti, L. (2020). Gender inequality and women poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(9), 375-387.
- Nurkse, Ragnar. (1961). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University press. New York.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 2(2), 44-66. doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160.
- Priyatno, D. (2023). *Olah data sendiri analisis regresi linier dengan SPSS dan analisis regresi data panel dengan Eviews*. Penerbit Andi.
- Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua [PUSDALISBANG]. (2016). *Manusia Papua: Membangun dan dibangun*. Diunduh pada link https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel/files/output/0f072b842e496e9c12da600a98cf7c7e_1495459920.pdf. Diakses pada 10 Agustus 2023.
- Putri, R. Y., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2019). Analisis kemiskinan berdasarkan gender di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 603-612.
- Rahman, A., Sirojuzilam, S., Pratomo, W. A., Nasution, I. G. S., Soeparno, W. S. I., Hakim, S. H., & Syafii, M. (2022). Anomali pengaruh sektor industri terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *SOROT*, 17(2), 91-103. <http://dx.doi.org/10.31258/sorot.17.2.91-103>
- Ravallion, M. (1998). Poverty lines in theory and practice: Living standard measurement study, *Working Paper No.13*: The World Bank.
- Ravallion, M. (2020). Ethnic inequality and poverty in Malaysia since May 1969. Part 2: Poverty. *World Development*, 134, 105039. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105039>.
- Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu kajian berdasarkan faktor pendidikan, sosial, ekonomi, lokasi dan IPM. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 8(1), 37-50.
- Sen, A. (1990). *Development as capability expansion*. New York. The community development reader.
- Side, S., Sukarna, & Nurfitriah, R. (2019). Analisis regresi panel pada pemodelan angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Matematika, Komputasi, dan Statistik*, 2(2), 115-125. <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v2i2.12574>
- Sugiyono, (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabta.
- Tanziha, I., Utomo, H., Utami, A., Arifin, J., Angraini, S., Bodromurti, W., Nurhayati. (2021). *Pembangunan manusia berbasis gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Triono, T. A., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Studi literatur laporan data kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59-67.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2016). Ending poverty by 2030: UNDP's perspective and role. New York (US): *United Nations Development Programme*.
- Walid, W., & Pratama, B. R. (2020). Analysis of gender inequality in poverty reduction program. *Economics Development Analysis Journal*, 9(4), 482-497. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i4.41950>.

Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Worldbank. (2023). Ratio of poverty headcount to income of \$2.15 per day (2017 PPP) (% of population) - Indonesia. Diunduh pada link <https://data.worldbank.org/indicator/SI.PO>

V.DDAY?end=2021&locations=ID&start=2010. Diakses pada 12 Juli 2023.

Wulandari, M. C., & Ratnasari, D. F. (2022). Hubungan pendapatan perempuan dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Karesidenan Kartasura. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Fakultas Ekonomi*. 326-334.